

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN
NOTARIS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT OLEH MAJELIS
PENGAWAS WILAYAH SUMATERA BARAT**

Diajukan guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh gelar Magister

Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas



Diajukan oleh :

Nama : TESSA NANDA UNTARI

NIM 1620123038

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN NOTARIS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT OLEH MAJELIS PENGAWAS WILAYAH SUMATERA BARAT

Tessa Nanda Untari, NIM 1620123038, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2020, 110 halaman

ABSTRAK

Dalam kehidupan manusia disadari bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi perlu orang lain, Hak dan Kewajiban inilah yang harus dipagari dengan dokumen-dokumen yang dijamin keabsahannya. Salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik adalah notaris, beberapa kewenangan lain yang dimiliki notaris sebagaimana yang dimaksud notaris dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN). Terkait kewenangan yang melekat pada jabatan notaris ini membuat Negara mengatur terkait pengawasan dan sanksi bagi notaris yang melanggar peraturan pelaksanaan jabatan. Notaris harus tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris, Kode etik notaris dan juga peraturan lainnya yang berkaitan dengan jabatan notaris. Penegakan hukum penting adanya pada proses pengawasan & penjatuhan sanksi kepada seorang notaris yang tidak tunduk pada UUJN, Pengawasan terhadap notaris dilakukan menteri yang dalam pelaksanaannya pengawasan tersebut dibentuk Majelis Pengawas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan sifat pelanggaran yang dilakukan oleh notaris di Kabupaten Pasaman Barat yang ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Barat dan bagaimana penegakan hukum oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Barat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris di Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan Metode Yuridis Empiris. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil kesimpulan bahwa. Bentuk dan sifat pelanggaran yang dilakukan oleh notaris di Kabupaten Pasaman Barat yang ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumbar adalah bentuk pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan notaris yang diatur dalam UUJN dan sifat pelanggarannya administratif. Penegakan hukum oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Barat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris Provinsi Sumbar biasanya bisa bersumber dari pengaduan masyarakat baik kepada Majelis Pengawas Wilayah maupun Daerah dan dari pemeriksaan protokol notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah secara berjangka yang nantinya akan diteruskan ke Majelis Pengawas Wilayah.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Majelis Pengawas, Notaris

**LAW ENFORCEMENT OF VIOLATIONS TAKEN BY NOTARIES IN WEST
PASAMAN DISTRICT BY SUPERVISOR OF THE SUMATERA WEST
SUMATERA SUPERVISOR**

ABSTRACT

Tessa Nanda Untari, NIM 1620123038, Postgraduate Masters of Notary Master of
Law Study Program, Andalas University, Padang, 2020, 110 pages

In human life it is realized that humans cannot live alone, but need other people. These rights and obligations must be fenced off with documents guaranteed to be valid. One of the public officials who is authorized to make an authentic deed is a notary, several other authorities held by a notary public as referred to by notary in Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (hereinafter abbreviated to UUJN) Related to the authority inherent in the position of notary, the State regulates the related supervision and sanctions for notaries who violate the rules of office implementation. Notaries must comply with the Law of Notary Position, Notary Code of Ethics and other regulations relating to the position of notary public. Law enforcement is important in the process of oversight & imposing sanctions on a notary who is not subject to the UUJN. Supervision of the notary is carried out by the minister who in the implementation of the supervision is formed the Supervisory Board. The problem in this research is how the form and nature of violations committed by notaries in West Pasaman Regency followed up by the Notary Regional Supervisory Board of West Sumatra and how law enforcement by the Notary Regional Supervisory Board of West Sumatra against violations committed by notaries in West Pasaman Regency using The Empirical Juridical Method Board of West Sumatra Province are forms of violations of the notary obligations and prohibitions stipulated in the UUJN and the nature of the administrative violations. Law enforcement by the Notary Regional Supervisory Board of West Sumatra for violations committed by the notary of West Sumatra Province can usually be sourced from public complaints to the Regional and Regional Supervisory Council and from the notary protocol inspection carried out by the Regional Supervisory Council in a periodic manner which will be forwarded to the Assembly Regional Superintendent

Keywords: Law Enforcement, Supervisory Board, Notary